

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCNA KAB.KEBUMEN TA 2022

BAB I PENDAHULUAN

A. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan OPD Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Berwibawa dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
22. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 74 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.
23. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 21 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.

C. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab I	Pendahuluan	
	1.1	Maksud dan tujuan laporan keuangan SKPD
	1.2	Landasan Hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
	1.3	Sistematika Penulisan Catatan atas laporan keuangan SKPD
Bab II	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD	
	2.1	Ikhtisar Realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
	2.2	Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
Bab III	Penjelasan Pos -pos Laporan Keuangan SKPD	
	3.1	Rincian dari penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan SKPD :
		3.1.1 LRA
		3.1.2 L O
		3.1.3 Neraca
		3.1.4 LPE
		3.1.5 CALK
	3.2	Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas yang menggunakan basis akrual.
Bab IV	Penjelasan dan informasi-informasi non keuangan	
Bab V	Penutup	

BAB II
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD

A. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

a. Pendapatan

Realisasi Pendapatan – LRA yang diperoleh selama Tahun Anggaran 2022 sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 mencapai sebesar Rp.321.637.037.698 atau 126,92% dari anggaran sebesar Rp. 253.423.014.000,- dan mengalami kenaikan sebesar 8,60%.Tabel berikut menunjukkan realisasi pendapatan yang dicapai.

Anggaran dan Realisasi Pendapatan – LRA

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Retibusi Pelayanan Kesehatan	725.000.000	1.305.252.800	580.252.800	180,03	1.500.485.137
2.	Lain-lain PAD yang Sah	252.698.014.000	320.331.784.898	67.633.770.898	126,76	294.669.542.386
Jumlah		253.423.014.000	321.637.037.698	68.938.097.235	126,91	296.170.027.523

b. Belanja

Realisasi Belanja TA 2022 sebesar Rp. 570.379.246.579,- dan anggaran sebesar Rp. 604.617.704.000 atau mencapai 94,34%. Dan bila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp. 573.991.098.779,-, realisasinya mengalami penurunan sebesar 0,63%.

1. Realisasi Belanja Per Akun

Rician realisasi belanja per akun disajikan sebagai berikut :

URAIAN JENIS BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	PROSENTASE
	T.A 2022	T.A 2022	
BELANJA			
BELANJA OPERASI			
Belanja Pegawai	136.434.355.000,00	130.297.027.522,00	95,50
Belanja Barang dan Jasa	384.519.244.000,00	363.858.299.104,00	94,63
Belanja Hibah	330.000.000,00	304.000.000,00	92,12
Belanja Bantuan Sosial	3.302.754.000,00	1.809.490.550,00	54,79
Jumlah Belanja Operasi	524.586.353.000,00	496.268.817.176,00	94,60
BELANJA MODAL			
Belanja Modal Tanah	157.710.000,00	32.747.550,00	20,76
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	67.721.666.000,00	63.730.108.209,00	94,11
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	11.425.843.000,00	9.808.494.384,00	85,84
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	230.192.000,00	221.692.260,00	96,31
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	15.000.000,00	5.400.000,00	36,00
Belanja Modal Aset Lainnya	480.940.000,00	311.987.000,00	64,87
Jumlah Belanja Modal	80.031.351.000,00	74.110.429.403,00	92,60
JUMLAH BELANJA	604.617.704.000,00	570.379.246.579,00	94,34

2. Realisasi Belanja per Sub Kegiatan

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		SISA
			TOTAL	%	ANGGARAN
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan	35.000.000,00	33.655.750,00	96,16	1.344.250,00
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.000.000,00	37.841.300,00	94,60	2.158.700,00
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	133.820.918.000,00	128.253.310.052,00	95,84	5.567.607.948,00
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	423.912.000,00	412.690.909,00	97,35	11.221.091,00
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000,00	19.965.000,00	99,83	35.000,00
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	44.500.000,00	44.450.000,00	99,89	50.000,00
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	55.000.000,00	54.995.500,00	99,99	4.500,00
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.250.000,00	2.110.000,00	93,78	140.000,00
9	Penyediaan Bahan/Material	80.000.000,00	79.706.500,00	99,63	293.500,00
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000,00	29.992.000,00	99,97	8.000,00
11	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.000.000,00	3.999.700,00	99,99	300,00
12	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.650.000,00	15.631.980,00	72,20	6.018.020,00

13	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.320.000,00	18.725.000,00	92,15	1.595.000,00
14	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	1.940.420,00	97,02	59.580,00
15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Suber Daya Air dan Listrik	521.410.000,00	468.374.906,00	89,83	53.035.094,00
16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	124.000.000,00	123.751.400,00	99,80	248.600,00
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	178.000.000,00	162.582.176,00	91,34	15.417.824,00
18	Pemeliharaan Mebel	10.000.000,00	9.970.000,00	99,70	30.000,00
19	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	66.350.000,00	66.054.100,00	99,55	295.900,00
20	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	57.500.000,00	57.475.000,00	99,96	25.000,00
21	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	339.164.489.000,00	319.283.637.869,00	94,14	19.880.851.131,00
22	Pembangunan Puskesmas	130.000.000,00	128.764.023,00	99,05	1.235.977,00
23	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.000.692.000,00	923.127.573,00	92,25	77.564.427,00
24	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	945.300.000,00	945.185.163,00	99,99	114.837,00
25	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	155.000.000,00	153.798.000,00	99,22	1.202.000,00
26	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3.161.548.000,00	3.036.209.461,00	96,04	125.338.539,00
27	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	10.731.378.000,00	10.168.649.811,00	94,76	562.728.189,00
28	Pengadaan Obat, Vaksin	6.152.156.000,00	6.071.581.940,00	98,69	80.574.060,00
29	Pengadaan Bahan Habis Pakai	2.907.173.000,00	2.892.228.945,00	99,49	14.944.055,00
30	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2.026.229.000,00	2.018.678.060,00	99,63	7.550.940,00
31	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1.037.851.000,00	654.182.400,00	63,03	383.668.600,00
32	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	484.560.000,00	455.448.894,00	93,99	29.111.106,00
33	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	5.243.402.000,00	5.232.449.613,00	99,79	10.952.387,00
34	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1.088.139.000,00	1.072.567.500,00	98,57	15.571.500,00
35	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	6.695.196.000,00	6.655.751.680,00	99,41	39.444.320,00
36	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	1.628.391.000,00	1.609.599.720,00	98,85	18.791.280,00
37	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	700.690.000,00	690.301.800,00	98,52	10.388.200,00
38	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	563.988.000,00	555.731.510,00	98,54	8.256.490,00
39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	892.442.000,00	879.618.069,00	98,56	12.823.931,00
40	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.569.324.000,00	2.529.598.200,00	98,45	39.725.800,00
41	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	965.353.000,00	957.026.155,00	99,14	8.326.845,00
42	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	1.910.126.000,00	1.436.228.600,00	75,19	473.897.400,00
43	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	60.000.000,00	53.698.400,00	89,50	6.301.600,00
44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	5.061.828.000,00	4.920.368.886,00	97,21	141.459.114,00

45	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	110.000.000,00	108.390.000,00	98,54	1.610.000,00
46	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5.291.594.000,00	3.738.868.388,00	70,66	1.552.725.612,00
47	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	7.846.532.000,00	7.722.907.142,00	98,42	123.624.858,00
48	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional , Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	50.000.000,00	49.996.000,00	99,99	4.000,00
49	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.026.938.000,00	910.001.012,00	88,61	116.936.988,00
50	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	180.000.000,00	177.241.912,00	98,47	2.758.088,00
51	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2.662.442.000,00	2.629.310.450,00	98,76	33.131.550,00
52	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	23.282.690.000,00	23.082.118.708,00	99,14	200.571.292,00
53	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	50.000.000,00	37.718.000,00	75,44	12.282.000,00
54	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	10.385.241.000,00	9.320.531.000,00	89,75	1.064.710.000,00
55	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.247.295.000,00	1.864.050.104,00	82,95	383.244.896,00
56	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	60.000.000,00	59.999.500,00	100,00	500,00
57	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	150.000.000,00	144.212.991,00	96,14	5.787.009,00
58	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	25.000.000,00	24.258.010,00	97,03	741.990,00
59	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	0,00
60	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	45.000.000,00	44.911.738,00	99,80	88.262,00
61	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	2.200.000.000,00	2.199.643.137,00	99,98	356.863,00
62	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	65.000.000,00	64.959.400,00	99,94	40.600,00
63	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek , Toko Obat, Toko Alat Kesehatan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	63.960.000,00	63.912.025,00	99,92	47.975,00
64	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	414.376.000,00	411.734.854,00	99,36	2.641.146,00
65	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	65.000.000,00	65.000.000,00	100,00	0,00
66	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	210.000.000,00	208.950.051,00	99,50	1.049.949,00
67	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	172.500.000,00	172.500.000,00	100,00	0,00
68	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	60.000.000,00	56.265.166,00	93,78	3.734.834,00
69	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	100.000.000,00	98.589.200,00	98,59	1.410.800,00
70	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	30.000.000,00	29.801.500,00	99,34	198.500,00
71	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	36.340.000,00	36.300.000,00	99,89	40.000,00
72	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	124.800.000,00	88.992.612,00	71,31	35.807.388,00
73	Advokasi Program KBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	64.375.000,00	48.752.750,00	75,73	15.622.250,00
74	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	25.000.000,00	24.600.000,00	98,40	400.000,00

75	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	94.640.000,00	43.930.475,00	46,42	50.709.525,00
76	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	405.600.000,00	170.550.000,00	42,05	235.050.000,00
77	Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK	1.059.456.000,00	1.022.928.664,00	96,55	36.527.336,00
78	Pengendalian Program KKBPK	40.000.000,00	39.550.000,00	98,88	450.000,00
79	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	3.371.634.000,00	3.352.310.243,00	99,43	19.323.757,00
80	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	25.200.000,00	23.300.100,00	92,46	1.899.900,00
81	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2.541.832.000,00	2.108.809.270,00	82,96	433.022.730,00
82	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.257.312.000,00	1.138.434.900,00	90,55	118.877.100,00
83	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	19.800.000,00	18.580.000,00	93,84	1.220.000,00
84	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	20.000.000,00	19.996.900,00	99,98	3.100,00
85	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	1.321.667.000,00	1.306.287.360,00	98,84	15.379.640,00
86	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	335.000.000,00	308.924.400,00	92,22	26.075.600,00
87	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksanaan/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	134.229.000,00	121.484.002,00	90,51	12.744.998,00
88	Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksanaan (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	5.875.186.000,00	3.747.405.500,00	63,78	2.127.780.500,00
89	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	80.000.000,00	78.092.500,00	97,62	1.907.500,00
90	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	60.000.000,00	59.037.350,00	98,40	962.650,00
JUMLAH		604.617.704.000,00	570.365.791.279,00	94,33	34.251.912.721,00

B. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Hambatan yang dihadapi secara umum dalam pencapaian target anggaran yang telah ditetapkan pada tahun anggaran 2022 antara lain :

a. Pendapatan

Pendapatan terealisasi sebesar 127,10% dari target pendapatan.

b. Belanja

Belanja langsung terserap 94,34% dikarenakan adanya sub kegiatan yang tidak bisa direalisasikan secara maksimal. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin, Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota tidak bisa memaksimalkan penyerapan anggaran.

BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
RINCIAN DARI PENJELASAN MASING-MASING POS PELAPORAN
KEUANGAN

A. Laporan Realisasi Anggaran

1. PENDAPATAN

Jumlah anggaran Pendapatan Tahun 2022 sebesar Rp.253.423.014.000 Terealisasikan sebesar Rp.321.637.037.698 atau 126,92% dari target yang ditetapkan.

Realisasi Pendapatan

DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
 KABUPATEN KEBUMEN
 Tahun Anggaran 2022

Pendapatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%	*)Realisasi 2021 (Rp)
Pendapatan Daerah	253.423.014.000	321.637.037.698	68.214.023.698	126,92	296.170.027.523

Pendapatan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022 melebihi target sebesar 127,10% dari anggaran dan turun 0,63% dari realisasi Tahun 2021.

a) Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 253.423.014.000,00 terdiri dari:

Pendapatan Asli Daerah	2022		%	Realisasi 2021 (Audited) (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Pajak Daerah				
Retribusi Daerah	725.000.000	1.305.252.800	180,03	1.500.485.137
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	252.698.014.000	320.331.784.898	126,76	294.669.542.386
Jumlah	253.423.014.000	321.637.037.698	126,92	296.170.027.523

Anggaran

Realisasi

1) Pajak Rp.....,00

Rp.....,00

Daerah

Pajak Daerah sebesar Rp 0,00 terdiri dari:

Pajak Daerah	2022		%	Realisasi 2021 (Audited) (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Pajak Hotel	-	-	-	-
Pajak Restoran	-	-	-	-
Pajak Hiburan	-	-	-	-
Pajak Reklame	-	-	-	-
Pajak Penerangan Jalan	-	-	-	-
Pajak Parkir	-	-	-	-
Pajak Air Tanah	-	-	-	-
Pajak Sarang Burung Walet	-	-	-	-
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	-	-	-
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	-	-	-	-
BPHTB	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-

Anggaran

Realisasi

2) Retribusi Rp. 725.000.000,00 Rp.1.305.252.800,00

Daerah

Retribusi Daerah yang dikelola Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp. 725.000.000,00 terdiri dari:

Retribusi	Tahun 2022		%	Realisasi 2021 (Audited) (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Retribusi Pelayanan Kesehatan	725.000.000	1.305.252.800	180,03	1.500.485.137
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	-	-	-	-
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	-	-	-	-
Retribusi Pelayanan Pasar	-	-	-	-
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	-	-	-	-
Retribusi Pelayanan Pendidikan	-	-	-	-
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	-	-	-
Retribusi Tempat Pelelangan	-	-	-	-
Retribusi Terminal	-	-	-	-

Retribusi Tempat Khusus Parkir	-	-	-	-
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa	-	-	-	-
Retribusi Rumah Potong Hewan	-	-	-	-
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	-	-	-	-
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	-	-	-	-
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	-	-	-	-
Retribusi Izin Gangguan	-	-	-	-
Retribusi Izin Trayek	-	-	-	-
	-	-	-	-

Pendapatan dari Retribusi terealisasi 180,03%, mengalami penurunan sebesar 0,06% jika dibandingkan pendapatan Retribusi Tahun 2021 yang sebesar Rp.1.500.485.137,00.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang dikelola Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen terealisasi sebesar Rp. 252.698.014.000,00 dari anggaran sebesar Rp. 320.331.784.898,00 terdiri dari:

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	2022		(%)	Realisasi 2021 (Audited) (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	-	-	-	-
Penerimaan Jasa Giro	-	-	-	-
Pendapatan Bunga	-	-	-	-
Pendapatan DendaKeterlam- batan Pelaksanaan Pekerjaan	-	-	-	-
Pendapatan denda pajak	-	-	-	-
Pendapatan denda retribusi	-	-	-	-
Pendapatan dari	-	-	-	-

pengembalian				
Pendapatan dari BLUD	252.698.014.000	320.800.626.098	126,95	294.669.542.386
Lain-lain PAD yang syah lainnya	-	-	-	-
Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	-	-	-	-
Hasil Pengelolaan dana Bergulir	-	-	-	-
Dana BOS	-	-	-	-
Jumlah	252.698.014.000	320.800.626.098	126,95	294.669.542.386

B. BELANJA- LRA

Realisasi belanja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen TA. 2022 adalah sebesar Rp.570.379.246.579,- atau 94,34% dari anggaran sebesar Rp.604.617.704.000,- Rincian Anggaran dan realisasi belanja TA. 2022 tersaji sebagai berikut :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2022

URAIAN JENIS BELANJA	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	PROSEN TASE	REALISASI 2021
BELANJA				
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai	136.434.355.000,00	130.297.027.522,00	95,50	140.221.930.168,00
Belanja Barang dan Jasa	384.519.244.000,00	363.858.299.104,00	94,63	350.850.912.934,00
Belanja Hibah	330.000.000,00	304.000.000,00	92,12	1.146.916.000,00
Belanja Bantuan Sosial	3.302.754.000,00	1.809.490.550,00	54,79	2.862.746.000,00
Jumlah Belanja Operasi	524.586.353.000,00	496.268.817.176,00	94,60	495.082.505.102,00
BELANJA MODAL				
Belanja Modal Tanah	157.710.000,00	32.747.550,00	20,76	628.973.110,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	67.721.666.000,00	63.730.108.209,00	94,11	57.875.166.420,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	11.425.843.000,00	9.808.494.384,00	85,84	19.207.905.797,00
Belanja Modal Jalan Irigasi Jaringan	230.192.000,00	221.692.260,00	96,31	466.936.350,00
Belanja Modal Aset Tetap lainnya	15.000.000,00	5.400.000,00	36,00	5.340.000,00
Belanja Modal Aset Lainnya	480.940.000,00	311.987.000,00	64,87	724.272.000,00
Jumlah Belanja Modal	8.003.1351.000,00	74.110.429.403,00	92,60	78.908.593.677,00

JUMLAH BELANJA	604.617.704.000,00	570.379.246.579,00	94,34	573.991.098.779,00
-----------------------	--------------------	--------------------	-------	--------------------

Berdasarkan Tabel diatas Perbandingan Realisasi Belanja TA 2022 dengan TA. 2021 menunjukkan bahwa realisasi belanja pada TA.2022 mengalami penurunan sebesar Rp. 3.611.852.200,-

Dengan rincian Belanja Operasi mengalami kenaikan sebesar Rp.1.186.312.074 dan Belanja Modal turun Rp. 4.798.164.274.

a) Belanja Operasi

Realisasi belanja operasi sebesar Rp.496.268.817.176,00 mencapai 94,60% dari anggaran sebesar Rp. 524.586.353.000,00, apabila dibandingkan dengan realisasi 2021 yang sebesar Rp.495.082.505.102 mengalami peningkatan sebesar 0,24%.

Belanja operasi terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Adapun rincian realisasi atas Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial TA. 2022 tersaji sebagai berikut :

Adapun rincian realisasi belanja operasi adalah sebagai berikut :

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)
BELANJA OPERASI	524.586.353.000,00	496.268.817.176,00	(28.317.535.824,00)
Belanja Pegawai	136.434.355.000,00	130.297.027.522,00	(6.137.327.478,00)
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	126.101.945.000,00	120.696.987.065,00	(5.404.957.935,00)
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	5.707.773.000,00	5.558.208.525,00	(149.564.475,00)
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.767.941.000,00	3.572.590.607,00	(195.350.393,00)
Belanja Pegawai BLUD	856.696.000,00	469.241.325,00	(387.454.675,00)
Belanja Barang dan Jasa	384.519.244.000,00	363.858.299.104,00	(20.660.944.896,00)
Belanja Barang	38.793.504.000,00	38.351.211.890,00	(442.292.110,00)

Belanja Jasa	48.325.846.000,00	44.730.388.439,00	(3.595.457.561,00)
Belanja Pemeliharaan	762.435.000,00	762.099.500,00	(335.500,00)
Belana Perjalanan Dinas	22.198.777.000,00	20.027.621.364,00	(2.171.155.636,00)
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	27.900.000,00	18.000.000,00	(9.900.000,00)
Belanja Barang dan Jasa BLUD	274.410.782.000,00	259.968.977.911,00	(14.441.804.089,00)
Belanja Hibah	330.000.000,00	304.000.000,00	(26.000.000,00)
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	330.000.000,00	304.000.000,00	(26.000.000,00)
Belanja Bantuan Sosial	3.302.754.000,00	1.809.490.550,00	(1.493.263.450,00)
Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	3.302.754.000,00	1.809.490.550,00	(1.493.263.450,00)

b) Belanja Modal

Realisasi belanja modal tahun 2022 sebesar Rp.74.110.429.403 atau tercapai 92,60% dari anggaran sebesar Rp.80.031.351.000,00. Dibandingkan realisasi tahun 2021 yang sebesar Rp.78.908.593.677,00 realisasi belanja modal tahun 2022 turun sebesar 6,08%.

Adapun rincian realisasi belanja modal adalah sebagai berikut:

Belanja Modal	2022		%	Realisasi 2021 (Audited) (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Belanja Modal Tanah	157.710.000	32.747.550	20,76	-124.962.450
Belanja Modal Tanah	157.710.000	32.747.550	20,76	-124.962.450
Belanja Peralatan dan Mesin	67.721.666.000	63.730.108.209	94,11	-3.991.557.791
Belanja Modal Alat Besar	334.025.000	328.757.100	98,42	-5.267.900
Belanja Modal Alat Angkutan	3.201.987.000	2.878.532.000	89,90	-323.455.000
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	106.930.000	92.385.363	86,40	-14.544.637
Belanja Modal Alat Pertanian	11.250.000	8.250.000	73,33	-3.000.000

Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.132.281.450	4.376.336.483	85,27	-755.944.967
Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	283.837.500	181.583.355	63,97	-102.254.145
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	54.046.358.050	51.876.531.684	95,99	-2.169.826.366
Belanja Modal Alat Laboratorium	601.311.000	550.710.008	91,58	-50.600.992
Belanja Modal Komputer	3.949.176.000	3.382.899.216	85,66	-566.276.784
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	43.850.000	43.639.000	99,52	-211.000
Belanja Modal Peralatan Olahraga	10.660.000	10.484.000	98,35	-176.000
Belanja Gedung dan Bangunan	11.425.843.000	9.808.494.384	85,84	-1.617.348.616
Belanja Modal Bangunan Gedung	11.391.723.000	9.775.535.384	85,81	-1.616.187.616
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	34.120.000	32.959.000	96,60	-1.161.000
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	230.192.000	221.692.260	96,30	-8.499.740
Belanja Modal Instalasi	210.000.000	210.000.000	100	0
Belanja Modal Jaringan	20.192.000	11.692.260	57,91	-8.499.740
Belanja Aset tetap Lainnya	495.940.000	317.387.000	64,00	-178.553.000
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	15.000.000	5.400.000	36,00	-9.600.000
Belanja Aset Tak Berwujud	480.940.000	311.987.000	64,87	-168.953.000
JUMLAH	80.031.351.000	74.110.429.403	92,60	-5.920.921.597

Belanja modal yang realisasinya tertinggi sebesar 96,30% adalah Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Sedangkan belanja modal yang realisasinya terendah yaitu belanja modal tanah dengan realisasi 20,76%

Kontribusi terbesar belanja modal adalah belanja modal gedung dan bangunan, yang mencapai 85,84% dari total belanja modal, kemudian belanja modal peralatan dan mesin sebesar 94,11%, belanja modal aset tetap lainnya 64,00%.

C. LAPORAN OPERASIONAL

1. Pendapatan –LO

Pendapatan - LO Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp.1.500.485.137,- dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Pendapatan – LO

No	Pendapatan – LO	2022 (Rp)	2021 (Audited) (Rp)
1	PAD – LO	250.170.430.657	344.200.266.420
2	Transfer – LO		
3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah – LO	104.570.775	0
	Jumlah	250.275.001.432	344.200.266.420

Dari tabel diatas dapat diketahui pendapatan LO tahun 2022 turun sebesar Rp.94.925.264.988 atau sebesar 27,29% dibandingkan tahun sebelumnya.

1. Beban

Realisasi Beban Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen pada TA.2022 adalah sebesar Rp.454.111.918.230,86 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Beban TA 2022 dan 2020

URAIAN	TAHUN 2022	TAHUN 2021	Kenaikan /Penurunan %
BEBAN			
Beban Operasi	454.111.918.230,86	567.028.441.316,68	(19,91)
Beban Transfer	-	-	
Beban Luar Biasa	-	-	
Total Beban	454.111.918.230,86	567.028.441.316,68	(19,91)

a. Beban Operasi

Beban Operasi tahun 2022 sebesar Rp.214.820.435.217 terdiri dari:

Realisasi Beban Operasi

No	Beban	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Pegawai	130.815.915.226,00	140.432.567.823,00	-6,85
2	Beban Persediaan	57.446.021.875,05	26.498.352.941,68	116,79
6	Beban Jasa	243.417.269.743,81	322.607.703.448,00	-24,55
7	Beban Pemeliharaan	762.099.500,00	1.260.226.854,00	-39,53
8	Beban Perjalanan Dinas Biasa	20.027.621.364,00	10.969.727.473,00	82,57
9	Beban Hibah	304.000.000,00	1.146.916.000,00	-73,49
10	Beban Bantuan Sosial	1.809.490.550,00	2.862.746.000,00	-36,79
11	Beban Penyisihan Piutang	-470.500.028,00	159.914.200,00	-394,22
17	Beban Penyusutan dan Amortisasi	61.628.894.634,00	61.090.286.577,00	0,88
Jumlah		515.740.812.864,86	567.028.441.316,68	-9,04

Dari tabel diatas dapat diketahui Beban LO tahun 2022 turun sebesar Rp.112.916.523.085,82 atau sebesar 19,91% dibandingkan tahun sebelumnya.

a. Beban Pegawai

Realisasi Beban Pegawai Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.130.815.915.226,-

b. Beban Persediaan

Realisasi Beban Persediaan TA 2022 sebesar Rp57.446.021.875,05,-

c. Beban Jasa

Realisasi Beban Jasa pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen TA 2022 sebesar Rp 243.417.269.743,81,-.

d. Beban Pemeliharaan

Realisasi Pemeliharaan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen TA. 2022 sebesar Rp. 762.099.500,-

e. Beban Perjalanan Dinas

Realisasi Beban Pemeliharaan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Ta. 2022 sebesar

Rp.20.027.621.364,-

f. Beban Hibah

Beban Hibah TA. 2022 sebesar Rp. 304.000.000,-

g. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial TA. 2022 sebesar Rp.1.809.490.550,-

h. Beban Penyisihan Piutang

Rincian Beban Penyisihan Piutang

No	Jenis Beban	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan	-470.500.028	159.914.200-
2	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
	Jumlah	-470.500.028	159.914.200

i. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp. 61.628.894.634,00

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

NO	Jenis Beban	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	52.449.658.306,00	
2.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	7.160.705.570,00	
3.	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.833.907.458,00	
4.	Beban Penyusutan Aset lainnya		
5.	Beban Amortisasi Aset Tdak Berwujud	184.623.300,00	
	Jumlah	61.628.894.634,00	

Surplus/defisit –LO

Surplus defisit – LO untuk tahun 2022 sebesar Rp.268.924.165.455,53 atau turun sebesar 46.095.990.558,85 dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp.222.828.174.896,68,-

D. Neraca

1. ASET

a. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing

sebesar Rp 156.919.467.605,17,-dan Rp 225.675.192.633,03,-

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen per 31 Desember 2022 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel

Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Aset Lancar	TA 2021	TA 2020
1	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
3	Kas di Badan Layanan Umum Daerah	87.496.345.014,98	96.376.474.671,98
12	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	13.597.630.566,00	88.566.374.963,00
15	Penyisihan Piutang	(1.741.814.618,00)	(2.212.314.646,00)
17	Persediaan	54.155.585.953,19	42.944.657.644,05
JUMLAH ASET LANCAR		153.507.746.916,17	225.675.192.633,03

1) Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,- . saldo ini merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP yang belum disetorkan ke Kas Daerah per tanggal neraca.

2) Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar masing-masing Rp 0,- dan Rp 0,-. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai yang berada dibawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa pelayanan dan pendapatan lain yang sah.

3) Kas di Badan Layanan Umum Daerah

Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp

87.496.345.014,98.- terdiri dari saldo kas di UPT Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah.

4) Piutang

Piutang Pendapatan

Saldo Piutang per 31 Desember 2022 disajikan bruto sebelum dikurangi penyisihan piutang yang disajikan terpisah pada akun Penyisihan Piutang. Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi. Saldo Piutang sebesar Rp 13.597.630.566,-terdiri dari:

Rincian Piutang per 31 Desember 2022

PIUTANG DAERAH	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Audited) (Rp)
1) Piutang Pendapatan		
a. Piutang Pajak	-	-
b. Piutang Retribusi	-	-
c. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-
d. Piutang Lain-Lain PAD yang sah	13.597.630.566	88.566.374.963-
2) Piutang Lainnya	-	-
JUMLAH	13.597.630.566	88.566.374.963

Daftar saldo piutang per UPT Dinas Kesehatan Pengendalain Penduduk dan Keluarga

5) Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp.54.155.585.953,19,- dan Rp. 42.944.657.644,05,-

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Adapun saldo persediaan sebesar Rp.54.155.585.953,19,- merupakan saldo persediaan atas Bahan, Alat/Bahan

Untuk Kegiatan Kantor, Obat-obatan dan Natura dan Pakan yang belum habis/belum digunakan sampai dengan tanggal neraca.

Persediaan bahan habis pakai terdiri dari:

NO	Uraian	Jumlah
1	Bahan Bangunan dan Konstruksi	37.562.630,00
2	Bahan Kimia	3.480.687.148,00
3	Bahan Baku	364.983.434,00
4	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	825.000,00
5	Isi Tabung Gas	53.814.000,00
6	Bahan Lainnya	2.827.627.447,73
7	Suku Cadang Alat Kedokteran	230.707.019,00
8	Alat Tulis Kantor	483.621.928,50
9	Kertas dan Cover	2.506.950,00
10	Bahan Cetak	914.786.089,00
11	Benda Pos	7.824.552,00
12	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	3.412.800,00
13	Bahan Komputer	1.890.000,00
14	Perabot Kantor	72.841.062,00
15	Alat Listrik	115.107.081,00
16	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	91.122.626,00
17	Obat	44.714.245.516,06
18	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	23.816.952,00
19	Natura	728.203.717,90
Jumlah		54.155.585.953,19

6) Aset Tetap

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 2021 tersaji sebesar Rp 568.557.873.930,- dan Rp 497.029.988.777,-Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap OPD Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen per 31 Desember 2022 dan 2021 disajikan pada Tabel berikut:

Rincian Aset Tetap

No	Jenis	T.A 2022	T.A. 2021
1	Tanah	23.721.534.746,00	23.249.434.746,00
2	Peralatan dan Mesin	480.227.933.602,00	417.558.449.437,00
3	Gedung dan Bangunan	366.694.829.617,00	364.357.759.129,00
4	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	47.656.498.889,00	47.446.498.889,00
5	Aset Tetap Lainnya	28.851.552,00	23.801.552,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	6.283.614.500,00	449.432.000,00
7	Akumulasi Penyusutan	(414.592.049.515,00)	(356.055.388.976,00)
JUMLAH ASET TETAP		510.021.213.391,00	497.029.986.777,00

a. Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp 23.721.534.746,- dan Rp 23.249.434.746,-

Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2021	Rp 23.249.434.746
Mutasi tambah:	
Pembelian tanah untuk Puskesmas	Rp 32.747.550
Mutasi dari SKPD lain	
Koreksi tambah Aset	Rp 5.228.457.586
Total Tambah	Rp 5.261.205.136
Mutasi kurang:	
Mutasi ke SKPD lain	
penghapusan	Rp 4.789.105.136
Total kurang	Rp 4.789.105.136
Saldo per 31 Desember 2022	Rp 23.721.534.746

Tanah yang tercatat di Neraca OPD Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen terdiri dari :

No	Uraian	Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir
1	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	108.433.950	-	-	108.433.950
2	Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	487.718.000	-	-	487.718.000
3	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	21.810.234.471	5.228.457.586	4.789.105.136	22.249.586.921
4	Tanah Lapangan Parkir	5.725.000	-	-	5.725.000
5	Tanah Kampung	837.323.325	32.747.550	-	870.070.875

	Jumlah	23.249.434.746	5.261.205.136	4.789.105.136	23.721.534.746
--	---------------	----------------	---------------	---------------	----------------

b. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp 480.227.933.602,- dan Rp 417.558.449.437-

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut

Saldo per 31 Desember 2020	Rp 417.558.449.437
Mutasi tambah:	
Belanja Modal	Rp
Mutasi dari SKPD lain	Rp
Reklas/koreksi tambah Aset	Rp
Total tambah	
Mutasi kurang:	
Penghapusan	Rp
Rusak Berat	Rp
Mutasi ke SKPD lain	Rp
Koreksi	Rp
Reklas (dari BM Intra ke Ekstra)	Rp
Total kurang	Rp
Saldo per 31 Desember 2021	Rp 480.227.933.602

c. Gedung dan Bangunan

Nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp 366.694.829.617,- dan Rp 364.357.759.129,-

Saldo per 31 Desember 2021	Rp 364.357.759.129
Mutasi tambah:	
Belanja Modal	
Mutasi dari SKPD lain	
Koreksi / Reklas tambah Aset	
Total Tambah	
Mutasi kurang:	
Penghapusan Aset	
Rusak Berat	
Mutasi ke SKPD Lain	
Reklas Aset (dari BM Intra ke Ekstra)	
Total Kurang	
Saldo per 31 Desember 2022	Rp 366.694.829.617

Nilai Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 374.166.253.513,- terdiri dari :

No	Uraian Gedung dan Bangunan	Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir
1	Bangunan gedung tempat kerja	Rp 50.133.035.030	Rp 16.773.928.947	Rp 32.520.913.031	Rp 34.386.050.946
2					Rp -
3					Rp -
4					Rp -
	Jumlah	Rp 50.133.035.030	Rp 16.773.928.947	Rp 32.520.913.031	Rp 34.386.050.946

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 47.656.498.889,- dan Rp 47.446.498.899,-

Saldo per 31 Desember 2021	Rp 47.446.498.889
Mutasi tambah:	
Belanja Modal	Rp -
Mutasi dari SKPD LAin	Rp -
Koreksi Tambah/reklas aset	Rp -
Total Tambah	
Mutasi kurang:	
Penghapusa Aset	Rp -
Rusak Berat	Rp -
Mutasi ke SKPD Lain	Rp -
Koreksi/reklas aset	Rp -
Total Kurang	
Saldo per 31 Desember 2022	Rp 47.668.191.149

Nilai Aset Jaringan sebesar Rp 47.668.191.149,- merupakan Jaringan SIMPUS dan tambah daya gedung Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen.

e. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp 28.851.552,- dan Rp 23.801.552,-

Saldo per 31 Desember 2020	Rp 23.801.552
Mutasi tambah:	
Belanja Modal 2020	Rp -
Mutasi ke SKPD Lain	Rp -
Koreksi Tambah /reklas aset	Rp -
Total Tambah	

Mutasi kurang:	Rp	-
Penghapusan Aset	Rp	-
Rusak Berat	Rp	-
Mutasi ke SKPD	Rp	-
Koreksi/reklas aset	Rp	-
Total Kurang		
Saldo per 31 Desember 2021	Rp	28.851.552

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp 6.283.614.500,- dan Rp 449.432.000,-

Saldo per 31 Desember 2019	Rp	3.056.073.750
Mutasi tambah:		
Koreksi	Rp	-
Pembelian	Rp	-
Mutasi kurang:		
Penyelesaian KPD	Rp	2.997.399.750
Saldo per 31 Desember 2020	Rp	58.674.000

g. Akumulasi Penyusutan Aset

Akumulasi Penyusutan Tetap TA. 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp dan Rp. OPD Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen tahun 2020 merupakan tahun ke-6 melakukan pelaporan keuangan dari kas basis ke acrual basis, sehingga tahun 2022 merupakan tahun ke-7 dalam melakukan penyusutan.

7. Dana Cadangan

Dana Cadangann

Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dalam hal OPD Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen sebagai SKPD, tidak ada Dana Cadangan pada OPD Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen untuk tahun 2022.

8. Aset Lainnya

Nilai Aset Lainnya pada tanggal pelaporan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp 176.783.006),-dan Rp 1.557.591.246,-. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan, baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap. Aset Lainnya Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaKabupaten Kebumen terdiri dari :

a. Aset Tak Berwujud Lainnya

Nilai Saldo aset tak berwujud (ATB) per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp 1.846.233.000,- dan Rp 1.534.246.000,-.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Saldo per 31 Desember 2021	Rp 1.534.246.000
Mutasi tambah:	Rp
DED	
Mutasi kurang:	
Amortisasi DED	Rp.
Penghapusan	Rp
Saldo per 31 Desember 2022	Rp 1.846.233.000

b. Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp.(1.389.469.206),- dan Rp 656.892.046.- Nilai Aset Lain-lain merupakan Aset Tetap yang kondisinya rusak berat yang dimiliki Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaKabupaten Kebumen. Adapun rincian aset lain-lain sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2020	Rp 656.892.046
Mutasi tambah:	
Belanja Modal 2020	Rp -
Mutasi dari SKPD Lain	Rp -
Koreksi	Rp 0
Reklas	Rp -
Total Tambah	Rp -
Mutasi kurang:	Rp -
Penghapusan Aset	Rp -
Rusak Berat	Rp -

Mutasi ke SKPD lain	Rp	-
Koreksi	Rp	-
Total Kurang	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2021	Rp	656.892.046

c. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud pada TA. 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp 633.546.800 dan 633.546.800.

1. KEWAJIBAN

a) Kewajiban Jangka Pendek

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 dan 2021 tersaji sebesar Rp 23.049.388.702,- dan Rp 53.719.848.752,-

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
		(Rp)	(Rp)
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka	43.783.333,00	134.200.000,00
3	Utang Belanja	23.005.605.369,00	53.585.648.752,00
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
Jumlah		23.049.388.702,00	53.719.848.752,00

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing nihil.

Utang Perhitungan Pihak Ketiga sebesar merupakan potongan pajak yang belum disetorkan ke Kas Negara per 31 Desember 2022

II. Pendapatan diterima dimuka

Pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan yang sudah diterima oleh Pemerintah Daerah namun belum sepenuhnya merupakan hak Pemerintah Daerah, karena menyangkut pendapatan atas periode berikutnya, yang posisi per 31 Desember 2022 diterima SKPD sebagai berikut:

No.	OPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	-	-	Pendapatan diterima dimuka

			atas.....
2.	-	-	-
3.	--	-	-
4.	-	-	-
	Jumlah	-	-

2. EKUITAS

Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas Dana per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 702.251.169.827,17,- dan Rp 670.542.921.904,03,-.

E. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut :

URAIAN	2022	2021
EKUITAS AWAL	670.542.921.904,03	63.733.132.930,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(203.836.916.798,86)	(147.051.910.606,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Ekuitas	(4.316.916.502,00)	30.138.952.945,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	239.862.079.224,00	277.821.071.256
EKUITAS AKHIR	702.251.167.827,17	634.560.188.459,03

BAB IV. PENJELASAN INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen dibentuk berdasarkan :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomo 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Kebijakan desentralisasi di tingkat Kabupaten mengakibatkan dampak pada pemberian kewenangan yang lebih luas bagi daerah kabupaten untuk menyelenggarakan pembangunan kesehatan sesuai kemampuan dan kondisi daerah. Peran Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen dalam pembangunan daerah diantaranya adalah:

1. Mengembangkan Jaminan Kesehatan
2. Meningkatkan kesadaran perilaku hidup sehat dan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat
4. Meningkatkan upaya perbaikan gizi masyarakat
5. Meningkatkan upaya pengendalian penyakit menular dan tidak menular
6. Memperluas akses dan peningkatan pelayanan pada ibu selama kehamilan dan pasca melahirkan pada pelayanan yang baik dan standart
7. Memperluas akses dan peningkatan pelayanan pada bayi pasca kelahiran pada pelayanan yang baik dan standar
8. Meningkatkan mutu obat dan perbekalan kesehatan
9. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan
10. Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesehatan

Sesuai Peraturan Bupati Kebumen nomor 45 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bahwa Dinas merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintah di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri atas (1) Kepala Dinas , (2) Sekretariat, (3) Bidang Kesehatan Masyarakat, (4) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, (5) Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas, (7) Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kepala Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit dan pelayanan serta sumber daya kesehatan
- b. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit dan pelayanan dan sumber daya kesehatan
- c. Pelaksanaan koordinasi di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit dan pelayanan dan sumber daya kesehatan
- d. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit dan pelayanan dan sumber daya kesehatan
- e. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit dan pelayanan dan sumber daya kesehatan
- f. Pelaksanaan administrasi Dinas
- g. Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya

Sesuai Peraturan Daerah Tersebut Susunan Organisasi Sekretariat

Daerah adalah :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Subbagian Keuangan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional
3. Bidang, terdiri dari
 - A. Bidang Sumber Daya, Pemberdayaan dan Promosi Kesehatan , terdiri dari :
 - 1) Subkoordinator Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - 2) Subkoordinator Pemberdayaan dan Promosi Kesehatan
 - 3) Subkoordinator Pembinaan dan Pengawasan Perizinan.
 - B. Pelayanan Kesehatan , terdiri dari :
 - 1) Subkoordinator Kefarmasian dan Penunjang Fasilitas Kesehatan
 - 2) Subkoordinator Pengembangan Fasilitas Kesehatan
 - 3) Subkoordinator Mutu dan Regulasi Kesehatan
 - C. Bidang Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Masyarakat , terdiri dari :
 - 1) Subkoordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat
 - 2) Subkoordinator Kesehatan Lingkungan, Kerja, Olah Raga dan Operasional Fasilitas Kesehatan
 - 3) Subkoordinator Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular
 - D. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri dari :
 - 1) Subkoordinator Pengendalian Kependudukan
 - 2) Subkoordinator Keluarga Berencana
 - 3) Subkoordinator Keluarga Sejahtera dan Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Advokasi
 - E. 38 UPTD yang berada dibawah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen terdiri dari :
 1. UPTD Unit Puskesmas Adimulyo
 2. UPTD Unit Puskesmas Alian
 3. UPTD Unit Puskesmas Ambal I

4. UPTD Unit Puskesmas Ambal II
5. UPTD Unit Puskesmas Ayah 1
6. UPTD Unit Puskesmas Ayah 2
7. UPTD Unit Puskesmas Bonorowo
8. UPTD Unit Puskesmas Buayan
9. UPTD Unit Puskesmas Buluspsantren I
10. UPTD Unit Puskesmas Buluspesantren II
11. UPTD Unit Puskesmas Gombang I
12. UPTD Unit Puskesmas Gombang II
13. UPTD Unit Puskesmas Karanganyar
14. UPTD Unit Puskesmas Karanggayam I
15. UPTD Unit Puskesmas Karanggayam II
16. UPTD Unit Puskesmas Karangsembung
17. UPTD Unit Puskesmas Kebumen I
18. UPTD Unit Puskesmas Kebumen II
19. UPTD Unit Puskesmas Kebumen III
20. UPTD Unit Puskesmas Klirong I
21. UPTD Unit Puskesmas Klirong II
22. UPTD Unit Puskesmas Kutowinangun
23. UPTD Unit Puskesmas Kuwarasan
24. UPTD Unit Puskesmas Mirit
25. UPTD Unit Puskesmas Padureso
26. UPTD Unit Puskesmas Pejagoan
27. UPTD Unit Puskesmas Petanahan
28. UPTD Unit Puskesmas Poncowarno
29. UPTD Unit Puskesmas Prembun
30. UPTD Unit Puskesmas Puring
31. UPTD Unit Puskesmas Rowokele
32. UPTD Unit Puskesmas Sadang
33. UPTD Unit Puskesmas Sempor I
34. UPTD Unit Puskesmas Sempor II
35. UPTD Unit Puskesmas Sruweng
36. UPTD Unit Pengobatan Penyaki Paru

37. UPTD Unit Labkesda
38. RSUD Prembun
39. RSUD DR. SOEDIRMAN

BAB V. PENUTUP

Demikian Laporan Keuangan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen tahun anggaran 2022 dibuat sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban keuangan yang harus dilaksanakan, sebagai konsekuensi dari penggunaan dana APBD, serta sebagai perwujudan akuntabilitas SKPD sebagai sebuah entitas akuntansi /pelaporan.

Kebumen, 31 Desember 2022



dr. Wan Danardono, Sp. Rad, M.M.R

NIP. 19680321 199903 1 006